

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN  
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat  
Daerah di Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DONNY ANDIANSYAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2016**

## ABSTRAK

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada SKPD di Kota Bandar Lampung)**

**Oleh: Donny Andiansyah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, pelatihan staf keuangan, teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah pada kualitas pelaporan keuangan. survei dilakukan terhadap pegawai di bagian sekretariat, bagian bidang anggaran, bagian bidang perbendaharaan, dan bagian bidang akuntansi yang di ambil menggunakan metode *purposive sampling* dengan mendistribusikan kuesioner kemudian hasil kuesioner dianalisis menggunakan *software SPSS (Statistical Product And Service Solution)* versi 22.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa semua variabel x dalam penelitian ini (sumber daya manusia, pelatihan staf keuangan, teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah) berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier berganda dimana sumber daya manusia hasil analisis signifikansi sebesar 0,037 dengan nilai t- tabel sebesar 2.122, pelatihan staf keuangan analisis signifikansi sebesar 0.027 dengan nilai t-tabel sebesar 2,257, kualitas teknologi informasi analisis signifikansi sebesar 0.006 dengan nilai t-tabel sebesar 2,843, dan penerapan standar akuntansi pemerintah analisis signifikansi sebesar 0.039 dengan nilai t-tabel sebesar 2,106. Dari hasil tersebut nilai analisis signifikansi kurang dari 0.05 dan nilai t-tabel yang positif menunjukkan masing-masing variable berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

**Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Pelatihan Staf Keuangan, Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi, Pelaporan Keuangan**

## **ABSTRACT**

### **FACTORS ANALYSIS THAT AFFECT FINANCIAL REPORT QUALITY**

**By: Donny Andiansyah**

This study aims to determine the effect of human resources, finance staff training, information technology, and the government's application of accounting standards on the quality of financial reporting. a survey conducted on employees in the secretariat, part of the budget, part of the field of treasury and accounting fields part in the capture using purposive sampling method by distributing questionnaires and then the questionnaire results were analyzed using SPSS sofeware (Statistical Product And Sevice Solution) version 22.

Results of the study revealed that all variables x in this study (human resources, finance staff training, information technology, and application of accounting standards the government) have an effect on the quality of financial reporting. It can be seen from the results of multiple linear regression analysis in which the results of the analysis of human resources with a significance of 0.037 t value tables for 2122, finance staff training analyzes the significance of 0027 with t-table value of 2.257, the quality of the analysis of the significance of information technology for 0006 with t-table value of 2.843, and the government's application of accounting standards significance analysis of 0039 with t-table value of 2.106. The results of the analysis of the significance value less than 0.05 and the value of positive t-table shows each variable positive effect on the quality of financial reporting.

**Keywords: Human Resources, Financial Staff Training, Information Technology, Application of Accounting Standards, Financial Reporting**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN  
(Studi Kasus Pada SKPD Di Kota  
Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Donny Andiansyah**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA EKONOMI**

**Pada**

**Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KUALITAS  
PELAPORAN KEUANGAN  
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat  
Daerah di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Donny Andiansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1211031022

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**  
NIP 19750620 200012 2 001

**Lego Waspodo, S.E., M.Si., Akt**  
NIP 19790122 2009 12 1 001

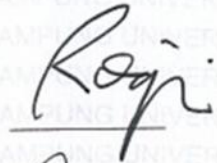
2. Ketua Jurusan Akuntansi

**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19620612 199010 2 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

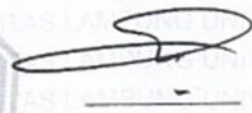
**Ketua : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si**



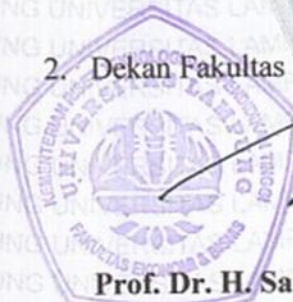
**Sekretaris : Lego Waspodo, S.E., M.Si., Akt.**



**Penguji Utama: Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 196109041987031011



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Oktober 2016**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada SKPD di Kota Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiatisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2016

Penulis,



Donny Andiansyah  
NPM 1211031022

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandung 02 Desember 1993. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersudara dari pasangan Bapak Sofwan Sanusi dan Ibu Siti Rachmah Sofiani. Penulis mengawali pendidikan formal di SD Pertiwi Teladan Metro yang diselesaikan pada tahun 2006, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Metro yang diselesaikan pada tahun 2009, dan masuk SMA Negeri 2 Metro yang diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Mandiri, dan pada tahun 2015 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang. Selama menjadi mahasiswa penulis terdaftar menjadi anggota dalam UKMF Himakta (Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan Pajak).



## **MOTTO**

“Dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”  
(Al-anfal : 46)

Bergerak Satu Langkah Lebih Baik Dari Pada Banyak Bicara  
Namun Tidak Bergerak  
(Donny Andiansyah)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.  
(Thomas Alfa Edison)

“Man Jadda Wajada”  
Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang,

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan Ibu, yang selalu membimbing, menyayangi dengan tulus, memberi dukungan, doa, serta nasehat yang tak henti-hentinya selama ini.

Teh Icha dan Bung Sonny yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan untukku.

Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan do'a.

Sahabat-sahabat dan Almamater tercinta jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus SKPD Di Kota Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si.,Akt. Sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. sebagai dosen Pembimbing Utama, terimakasih atas bimbingan, masukan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi.

5. Bapak Lego Waspodo, S.E., M.Si., Akt Sebagai dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan saran-sarannya selama proses penyelesaian skripsi.
6. Ibu Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen penguji, terimakasih atas saran dan masukan yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Ki Agus Andi, S.E., M.Si., Akt. sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
8. Kedua orangtuaku tercinta Ayah Sofwan Sanusi (Alm) dan Ibu Siti Rachmah Sofiani yang senantiasa memberikan nasihat, do'a, dan dukungan kepada penulis. Terimakasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini.
9. Kakak-kakaku Teh Anisa Putri dan Bung Sonny Prasetya yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Sahabat sekaligus saudara seperjuanganku Hidayana, Dessi Ardila, Rexi Rosandi, Ori Barlian, Eva, Ferly, Mukhlisin, Mutia, Pipit, Heni, Wulan, Mafia, Sakinah, Esti, Yunita, Yuni, Intan, Wayan, Robert Terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Semoga persahabatan ini akan terus terjalin.
11. Teman-teman AKT 2012 Adel, Ayu, Arul, Anggie, Assaumi, Azis, Agung, Apri, Ani, Argi, Bima, Claudia, Claudius, Citra, Dian, Dini, Dwi, Elia, Esa, Elvi, Fatkur, Fatur, Ojan, Fajrin, Madon, Ferryansah, Firda, Hadi, Fakhrul, Nopal, Haris, Huda, Indah, Liana, Raha, Agung, Riyadi, Mia, Muthia, Puji Kurnia Putri, Puspita, Ray, Kiki, Iin, Icha, Sindy, Siti, Sri, Susi, Tara, Trida,

Ulin, Wayan, Widya Maulin, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya selama ini.

12. Kakak tingkat jurusan Akuntansi Mba Yara, Mba Sofa, Mba Ayu, Mba Riris, Mba Puput, Mba Yosi, Mba Manda, Bunga, Citra, Mba Laras, Mba Mitha, Mba Hani, Mba Bunda, Mba Aya, Mba Sherly, Bang Nicho, Bang Agung, Mba Tya, Mba Cika, Mba Rizki, Mba Chyntia terima kasih telah membantu penulis selama di jurusan akuntansi.
13. Adik tingkat Jurusan Akuntansi Virsa, Mahlida, Martha, Maya, Yonatan, Yudis, Adit, Amel, Nia, Sekar, Icha, Gus, Kevin, terima kasih telah menyemangati penulis selama ini.
14. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2016  
Penulis,

**Donny Andiansyah**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian .....	8
1.3.1 Manfaat Penelitian .....	8
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 <i>New Public Management Theory</i> (Teori NPM).....	10
2.1.2 Teori Regulasi ( <i>Regulation Theory</i> ) .....	13
2.1.3 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	15
2.2 Pelaporan Keuangan.....	16
2.3 Sumber DayaManusia .....	21
2.4 Pelatihan Staf Keuangan .....	23
2.5 Kualitas Teknologi Informasi .....	24
2.6 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan .....	25
2.7 Kerangka Pemikiran.....	27
2.8 Pengembangan Hipotesis .....	28
2.8.1 Sumber Daya Manusia .....	28
2.8.2 Pelatihan Staf Keuangan .....	29
2.8.3 Kualitas Teknologi Informasi .....	30
2.8.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian .....	34
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	35
3.5 Metode Analisis .....	43
3.5.1 Uji Validitas .....	43
3.5.2 Uji Reliabilitas .....	44
3.5.3 Pengujian Hipotesis .....	44

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian .....	45
4.1.1 Karakteristik Responden.....	46
4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian .....	48
4.2 Analisis Data Penelitian .....	55
4.2.1 Uji Validitas dan Reabilitas .....	56
4.2.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	59
4.3 Pembahasan.....	62
4.3.1 Hasil Uji Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan .....	62
4.3.2 Hasil Uji Pengaruh Pelatihan Staf Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan .....	63
4.3.3 Hasil Uji Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan .....	64
4.3.4 Hasil Uji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan .....	65

## **BAB V Simpulan, Saran, dan Implikasi**

5.1 Simpulan .....	67
5.2 Saran .....	67
5.3 Implikasi .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **KUESIONER**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 3.2 Skor/Bobot Penilaian.....	43
Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner Penelitian.....	45
Tabel 4.2 Usia Responden.....	46
Tabel 4.3 Pendidikan Responden.....	47
Tabel 4.4 Lama Kerja Responden.....	47
Tabel 4.5 Jenis Kelamin Responden.....	48
Tabel 4.6 Uji Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4.7 Distribusi Tanggapan Responden Variabel X1.....	50
Tabel 4.8 Distribusi Tanggapan Responden Variabel X2 .....	51
Tabel 4.9 Distribusi Tanggapan Responden Variabel X3.....	52
Tabel 4.10 Distribusi Tanggapan Responden Variabel X4.....	53
Tabel 4.11 Distribusi Tanggapan Responden Variabel Y.....	54
Tabel 4.12 Uji Validitas.....	56
Tabel 4.13 Uji Reliabilitas.....	58
Tabel 4.14 Hasil Penghitungan Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	59
Tabel 4.15 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	62



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi sektor publik di dunia telah terlibat dalam strategi perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan, efisiensi dan efektifitas.

Perubahan tersebut menjadikan sistem manajemen tradisional sektor publik yang awalnya terkesan birokratis, kaku dan hierarkis menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan manajemen sektor publik tersebut kemudian dikenal dengan istilah *New Public Management (NPM)*.

NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan- perusahaan publik (Mardiasmo, 2009).

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen,*et al*, 2007).

Pengadopsian NPM di Indonesia dalam bidang reformasi keuangan negara dimulai dengan diberlakukannya paket undang-undang bidang keuangan negara UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Salah satu ketentuan dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara yaitu mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai basis penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah.

Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP dimaksud ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual.

Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas serta tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) serta mencatat aset dan kewajiban. Undang-undang tentang Keuangan Negara mensyaratkan pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 tahun. Batas waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (*full accrual*) diundur sampai dengan tahun 2014 (UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010).

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

**a. Relevan**

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan.

Dengan kata lain, informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (*predictive value*), dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*). Agar informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan (*timeliness*)

**b. Andal**

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut.

Suatu informasi dikatakan andal apabila:

- Dapat diuji kebenarannya (*verifiabel*)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

- Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

- Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

**c. Dapat dibandingkan**

Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.

#### **d. Dapat dipahami**

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif pelaporan keuangan tersebut, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi, kekurangan penerimaan daerah, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini diberi judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan**”

Penelitian mengenai kualitas pelaporan keuangan di Indonesia diantaranya dilakukan oleh Sukmaningrum (2013) dimana penelitiannya menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dimana faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penentu untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Sementara penelitian sebelumnya di beberapa negara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik, menyatakan bahwa kualitas dari laporan keuangan sering disertai dengan

sejumlah masalah (masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan keuangan) yang menghambat tingkat kualitas pelaporan keuangan (Christiaens, 2001).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sukmaningrum (2013) di Semarang yang menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pada pemerintah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kualitas informasi pelaporan keuangan pada sektor publik di Semarang yang cukup rendah, selain itu penelitian tersebut juga menunjukkan faktor-faktor kontigensi yang terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan tersebut

Diantaranya faktor sumber daya manusia, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Berbeda dengan Sukmaningrum (2013) penelitian ini menggunakan satuan kerja pemerintah daerah sebagai objek penelitian karena satuan kerja merupakan ujung tombak pemerintah pusat di daerah.

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah ini perlu dilakukan karena belum menyediakan bukti yang cukup meyakinkan mengenai keberhasilan para SKPD menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan peraturan yang baru dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik (Cohen *et al*, 2007; Carlin dan Guthrie, 2003).

Penelitian dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan penerapan

standar akuntansi pemerintah, diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan?
2. Apakah pelatihan staf keuangan berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan?
3. Apakah kualitas teknologi informasi berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan?
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh antara sumber daya manusia dengan kualitas pelaporan keuangan.
2. Mengetahui pengaruh antara pelatihan staf keuangan dengan kualitas pelaporan keuangan.
3. Mengetahui pengaruh antara teknologi informasi dengan kualitas pelaporan keuangan.



4. Mengetahui pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas pelaporan keuangan.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas pelaporan keuangan
2. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh pelatihan staf keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan
3. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kualitas teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan
4. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan

Kegunaan penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dan bagi para akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian- penelitian selanjutnya dan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Landasan Teori**

Landasan teori menjabarkan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian ini, mulai dari teori *New Public Management*, Teori Regulasi, dan Teori Keagenan. dan penjelasan mengenai variable dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut inilah yang akan mendukung perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

##### **2.1.1. Teori *New Public Management* (NPM)**

Hood (1995) mengenalkan paradigma baru dari ilmu administrasi publik yang sering disebut *New Public Management* (NPM) disebut NPM karena berangkat dari gagasan awal mula paradigma alternatif. Paradigma alternatif ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien.

NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan perusahaan publik (Mardiasmo, 2009).

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, *et al*, 2007).

Menurut Christiaens (2001), reformasi akuntansi pemerintahan sering menjadi langkah pertama reformasi pemerintah dan itulah sebabnya dapat dianggap sebagai kondisi yang penting dan prasyarat bagi keberhasilan reformasi pemerintah lainnya di bawah gelombang transformasi NPM, seperti reformasi organisasi dan manajerial. Oleh karena itu, penerapan yang efektif dan berkualitas dari reformasi akuntansi berperan penting dan dominan dalam penerapan dan keberhasilan praktik dan teknik NPM lain dalam organisasi publik yang berkualitas. Tanpa penerapan yang memadai semua keuntungan, tujuan dan harapan reformasi akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan dapat memberikan kualitas informasi manajerial dan keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukungnya (Christiaens dan Van Peteghem, 2003).

Secara khusus, dalam literatur akuntansi sektor publik internasional, inisiatif akuntansi akrual diperkirakan memiliki sejumlah manfaat yang dapat dikelompokkan dan diringkas sebagai berikut: (i) memberikan gambaran yang jelas dari total biaya pemerintah, program kegiatan dan layanan yang diberikan; pengukuran yang lebih baik untuk biaya dan pendapatan; peningkatan proses kontrol dan transparansi, (ii) fokus lebih besar pada output; fokus pada dampak

jangka panjang dari keputusan, (iii) penggunaan yang lebih efisien dan efektif dan manajemen sumber daya dan akuntabilitas yang lebih besar, (iv) pengurangan dan pengukuran yang lebih baik dari pengeluaran publik, (v) pelaporan yang lebih baik dari posisi keuangan organisasi sektor publik, (vi) manajemen keuangan yang lebih baik; peningkatan pengukuran kinerja dan perbandingan yang lebih baik dari kinerja manajerial antar periode dan organisasi dengan menghitung indikator berdasarkan data keuangan dan operasional yang komprehensif dan konsisten; (vii) perhatian lebih besar untuk aset dan informasi lebih lengkap mengenai kewajiban organisasi publik melalui aset yang lebih baik dan manajemen hutang; (viii) perencanaan yang lebih baik untuk kebutuhan dana masa depan (ix) membantu dengan keputusan membuat/membeli atau menyewa/membeli; (x) keputusan lebih baik tentang kelayakan penyediaan layanan (Mellett, 2002; Cohen *et al*, 2007; *International Federation of Accountant-Public Sector Committee*, 2000 dan 2002, pp 71-10).

Menurut Pollitt (2002), adopsi inovasi NPM dapat dikategorikan pada empat tahap yang berbeda: (1) pengungkapan, (2) keputusan, (3) praktik, dan (4) dampak dari perubahan. Penelitian ini berfokus pada tahap praktik di mana inovasi NPM secara teknis digunakan oleh organisasi sektor publik, termasuk faktor-faktor kontekstual dan organisasi yang dapat mempengaruhi penggunaan teknik-teknik baru dalam praktik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan secara obyektif adopsi dan penerapan aktual dari sistem akuntansi akrual pada pemerintah Indonesia dengan mengukur sejauh mana kualitas dari penerapan akuntansi akrual dan menguji dampak dari berbagai faktor yang berpotensi berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan.

### **2.1.2. Teori Regulasi (*Regulation Theory*).**

Teori ini dikemukakan oleh Stigler (1971) yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan. Kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi yang permintaan atau *demand* dan legislatif sebagai *supply*.

Terdapat dua teori dalam teori regulasi menurut Scott (2009) yaitu:

#### ***Public Interest Theory* (Teori Kepentingan Publik)**

Teori yang mempunyai pandangan bahwa regulasi haruslah dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial karena regulasi merupakan hasil dari permintaan publik atas koreksi kegagalan pasar, regulator berusaha sebaik mungkin memenuhi kebutuhan publik. Walaupun pandangan tersebut merupakan pandangan yang ideal, namun dalam implementasinya masih mengalami beberapa masalah. Permasalahan yang timbul dalam *Public Interest Theory* adalah kesulitan dalam menentukan berapa jumlah regulasi yang harus dibuat dan apakah regulasi tersebut akan mampu memuat semua pihak. Terdapat permasalahan yang serius yang terletak pada motivasi dari badan regulator. Adanya tugas yang kompleks, sulit bagi badan legislatif untuk mengawasi para regulator. Kemampuan badan legislatif untuk mendorong regulator bekerja untuk kepentingan publik menjadi lemah karena hal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga seringkali regulator akhirnya bekerja demi kepentingannya sendiri daripada kepentingan publik.

### ***Interest Group Theory (Teori Kepentingan Kelompok)***

Teori ini memberikan pandangan bahwa sebuah industri beroperasi dalam kepentingan kelompok. Teori kepentingan kelompok daripada regulasi meninjau bahwa suatu industri beroperasi mewakili sejumlah kelompok kepentingan atau konstituen. Pertimbangan beberapa industri manufaktur sebagai contoh.

Perusahaan-perusahaan di dalam suatu industri membentuk suatu kelompok kepentingan tertentu, seperti yang dilakukan pelanggannya. Kelompok kepentingan lainnya menjadi pengamat lingkungan, yang tugasnya berkonsentrasi dalam bidang tertentu yaitu pertanggungjawaban sosial industri.

Berbagai kelompok kepentingan akan melobi ke legislatif untuk bermacam jumlah dan jenis regulasi. Sebagai contoh; industri dengan sendirinya meminta regulasi untuk melindungi persaingan harga yang dihadapi atau menghadapi pelanggan pada operasinya dengan industri-industri yang berhubungan. Pelanggan mungkin akan membentuk kelompok-kelompok untuk melobi standar kualitas atau pengendalian harga.

Hubungan teori ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah pemerintah sebagai pembuat regulasi (regulator) menginginkan informasi dalam laporan keuangan yang dibuat oleh satuan kerja di setiap daerah berhasil menyampaikan informasi keuangan yang berkualitas untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan dimasa yang akan datang demi kepentingan publik (Stigler, 1971)

### 2.1.3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dari pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*. Diakui atau tidak pada pemerintahan terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dkk, 2006).

Sementara itu, menurut Lane (2003) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik, ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal dan agen. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Hal itu pun didukung Bergman dan Lane (1990) yang menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal dan agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*. Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan manajemen dengan kepentingan *stakeholder*, namun seringkali manajemen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap *stakeholder* baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan.

Penggunaan standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari agen kepada prinsipal. Dan dalam penelitian ini, satuan kerja merupakan agen yang mendapat mandat untuk menyampaikan laporan keuangan. Oleh karena itu kualitas pelaporan keuangan pada satuan kerja dapat menjadi salah satu tolok ukur dari pertanggungjawaban satuan kerja sebagai agen kepada masyarakat sebagai prinsipal.

## **2.2 Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan adalah catatan informasi tambahan atas laporan keuangan dari suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pelaporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi



jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan *prediktif* dan *prospektif*, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya

sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas dana;
- d. pendapatan;
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan; dan
- h. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode (PP 71-10).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menjelaskan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a) Relevan

Pelaporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi pelaporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

#### 4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

#### b) Andal

Informasi dalam pelaporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

##### 1. Penyajian Secara Jujur (*representational faithfulness*)

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

##### 2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

##### 3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.

c) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### **2.3 Sumber Daya Manusia**

Widodo (2001) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman

yang cukup memadai.

Wiley (2002) dalam Zetra (2009) mendefinisikan sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Matindas, 2002).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan proses pelaporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Oleh karena itu yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah pegawai yang berpengalaman dan bekerja sesuai dengan bidangnya terutama pegawai yang mengerti akan peran, fungsi, dan tugas dari pekerjaan serta berkerja berdasarkan pedoman yang ada (Sukmaningrum, 2013).

## 2.4 Pelatihan Staf Keuangan

Pelatihan (*training*) adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu (Stamatiadis *et al*, 2009). Pelatihan kerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal I ayat 9 adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan

Menurut Irianto (2009), pelatihan adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku (pengetahuan, skill, dan sikap) agar mencapai sesuatu yang diinginkan.

Pelatihan bagi pegawai merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar pegawai semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar.

Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini (*current job oriented*). Sasaran yang ingin dicapai dan suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini (Irianto, 2009). Dimensi dalam variabel pelatihan staf keuangan diantaranya dimensi kemampuan dimana yang menjadi indikatornya adalah pelatihan staf keuangan itu sendiri yang memadai serta

konsisten dan dimensi pengetahuan yang mana indikatornya adalah kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaannya (Kusuma, 2013).

## **2.5 Kualitas Teknologi Informasi**

Teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi.

Indriasari, dkk (2008) mengatakan teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.

Sedangkan menurut Haag dan Keen (1996), teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

Dimana teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (*software & hardware*) yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 1999).

Selain itu juga teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik, Secara implisit dan eksplisit teknologi informasi tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, yang



disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi (Lucas, 2000)

Adapula pengertian mengenai telekomunikasi informasi teknologi oleh Krumwiede (1998), dimana telekomunikasi teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Konsisten dengan sistem informasi dan model perubahan manajemen akuntansi, survei di sektor swasta, melaporkan bahwa inefisiensi sistem informasi dan keterbatasan data, seperti ketidakmampuan sistem informasi yang ada untuk menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat, dan *up-to-date* secara efektif, merupakan hambatan utama untuk pelaksanaan dan kegunaan sistem manajemen akuntansi (Krumwiede, 1998; McGowan dan Klammer, 1997; Kwon dan Zmud, 1987) dalam variabel kualitas teknologi informasi yang menjadi indikatornya adalah tersedianya teknologi informasi yang memadai serta dapat digunakan secara mudah, tepat, dan akurat (Indriasari, 2008)

## **2.6 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disusun oleh suatu

komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP merupakan landasan hukum bagi aparat pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

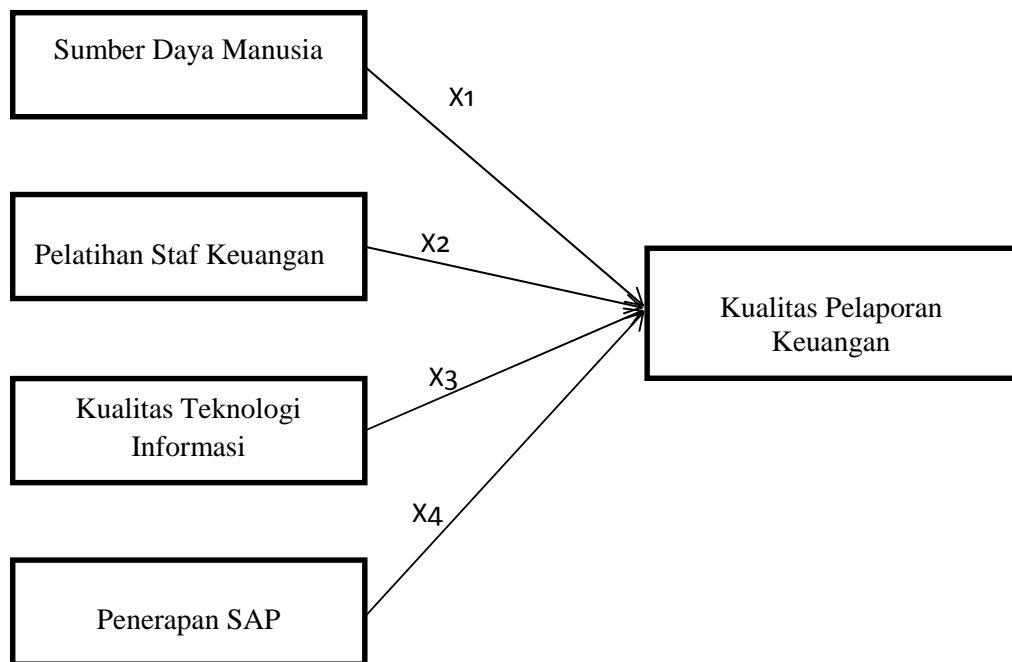
Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP yang kemudian akan digantikan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dan diterapkan selambat-lambatnya tahun 2015. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBK berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian, kajian pustaka dan tinjauan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## 2.8 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian dan kajian pustaka diatas, dikembangkan hipotesis berdasarkan faktor-faktor pada satuan kerja yang diduga memiliki pengaruh pada tingkat penerapan akuntansi akrual di instansi pemerintah tingkat satuan kerja, yang dirumuskan sebagai berikut:

### 2.8.1 Sumber Daya Manusia

SDM merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Organisasi yang dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011).

Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010). Menurut Nazier (2009), 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, juga ditemukan bahwa masih sulit bagi aparaturnya daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti SAP. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang

memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi (Zetra, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari Dkk (2008) membuktikan dalam penelitian bahwa kapasitas sumber daya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi Sumatera Selatan. Kemudian penelitian oleh Ouda (2008) yang menunjukkan pengaruh positif antara sumber daya manusia dengan kualitas pelaporan keuangan. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh kapaistas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.**

### **2.8.2 Pelatihan Staf Keuangan**

Menurut Krumwiede (1998), pelatihan yang memadai memiliki efek yang berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Demikian pula menurut Brusca (1997) yang menunjukkan bahwa pelatihan staf keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sementara itu, menurut

Ouda (2008) menunjukkan pengaruh negatif antara pelatihan staf akuntansi dengan kualitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Pelatihan staf keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.**

### **2.8.3 Kualitas Teknologi Informasi**

Penelitian Cohen *et al* (2007) menemukan bahwa teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di kotamadya-kotamadya Yunani merupakan alat yang sangat berguna untuk menilai fungsionalitas sebuah sistem dan tingkat kesesuaian dengan lingkungan organisasional. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya.

Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.

Konsisten dengan sistem informasi dan model perubahan manajemen akuntansi, survei di sektor publik, melaporkan bahwa inefisiensi sistem informasi dan keterbatasan data, seperti ketidakmampuan sistem informasi yang ada untuk menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat, dan *up-to-date* secara efektif, merupakan hambatan utama untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas (Krumwiede, 1998; McGowan dan Klammer, 1997; Kwon dan Zmud, 1987).

Krumwiede (1998), menunjukkan pengaruh yang positif pada kualitas pelaporan keuangan yang menyatakan bahwa organisasi dengan teknologi informasi yang lebih maju lebih dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan yang berkualitas daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. Juga oleh Stamatiadis, *et al*, (2009) yang memperlihatkan terdapat pengaruh positif antara kualitas teknologi informasi dengan kualitas pelaporan keuangan. Namun berbeda dengan peneliti sebelumnya Sukmaningrum (2013) yang menunjukkan tidak ada pengaruh antara kualitas teknologi informasi dengan kualitas pelaporan keuangan. Argumen ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut:

**H3: Kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.**

#### **2.8.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Bastian (2010: 137) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah.

“Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

Dengan mengacu pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dibandingkan dan berguna untuk penilaian kinerja pemerintah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan

pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAP.

Untuk mendukung pernyataan di atas, hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan SAP terhadap kualitas pelaporan keuangan, yaitu sebelum diterapkannya SAP maka laporan keuangan Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 belum dapat memecahkan permasalahan pencatatan keuangan dan belum ada cara untuk menyelesaikannya. Namun, setelah diterapkan SAP maka laporan keuangan tahun berikutnya telah memenuhi karakteristik pelaporan keuangan yang baik (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami).

Demikian juga penelitian yang dilakukan Lasoma (2013) menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan arah positif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Dimana dengan diterapkannya SAP akan turut meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan) dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara (Tanjung, 2008:31).



Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di wilayah kerja daerah Bandar Lampung. Pemilihan objek penelitian ini dengan pertimbangan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung dan merupakan kota yang telah memperoleh opini laporan keuangan yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut. Teknik penarikan sampel yang di gunakan adalah *purposive sampling*.

Dengan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Instansi yang sudah menerapkan SAP yang baru yakni akrual basis,
2. Pegawai yang berhubungan dengan pelaporan keuangan yaitu di bagian Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi Pelaporan,

Pemilihan bagian tersebut karena bagian tersebut yang bertanggung jawab dan yang mengerti akan pengelolaan laporan keuangan di dalam organisasi mereka, sehingga jawaban kuesioner dapat diandalkan.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini diperoleh dari survey responden berupa kuisisioner (Indriantoro, 2013).

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan Survey Lapangan. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode survey dalam penelitian ini adalah kuisisioner.

Kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuisisioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan (Indriantoro, 2013).

### **3.4 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan pengukurannya. Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen, dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Independen: Sumber Daya Manusia (X1)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh

potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kompetensi menurut Sukmaningrum (2012) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Variabel ini diukur menggunakan instrument kuesioner dengan *likert scale* 1 sampai 5, dimana responden diminta menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya dari setiap pertanyaan yang diajukan.

2. Variabel Independen: Pelatihan Staf Keuangan (X2)

Pelatihan staf keuangan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tersedianya pelatihan memadai yang diselenggarakan, baik oleh satuan kerja yang bersangkutan, instansi vertikalnya, ataupun instansi lain yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan pemerintah dari satuan kerja yang bersangkutan (Hood, 1995; Ouda, 2008). Variabel ini diukur menggunakan instrument kuesioner dengan *likert scale* 1 sampai 5, dimana responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya dari setiap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3. Variabel Independen: Kualitas Teknologi Informasi (X3)

Kualitas teknologi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tersedianya teknologi informasi yang memadai, terintegrasi dan mudah digunakan. Juga mampu mengolah dan menyediakan data yang akurat dan terkini dalam kaitannya dengan kualitas pelaporan keuangan (Indriasari Dkk, 2008). Variabel ini diukur menggunakan instrument kuesioner dengan *likert scale* 1 sampai 5, dimana responden diminta pendapatnya dari setiap

pertanyaan yang diajukan mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

4. Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X4)

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD (Tanjung, 2012 dalam Lasoma, 2013). Variabel penelitian ini diukur menggunakan *likert scale* 1 sampai 5, dimana responden diminta pendapatnya dari setiap pertanyaan yang diajukan mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

5. Variabel Dependen : Kualitas pelaporan keuangan (Y)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik kualitatif tersebut adalah relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Variabel ini diukur dengan menggunakan *likert scale* 1 sampai 5, dimana responden diminta pendapatnya dari setiap pertanyaan mulai dari tidak setuju sampai sangat setuju.

Untuk lebih jelasnya definisi operasional variabel, dimensi serta penyebaran indikator dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel**

<b>Jenis Variabel</b>	<b>Konsep Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Item</b>
Sumber Daya Manusia (X1)  Sukmaningrum (2013)	SDM merupakan <i>human capital</i> di dalam organisasi. <i>Human capital</i> merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan <i>economic rent</i> yang berkualitas tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011).	1. Tanggung Jawab	1. Peran dan fungsi dari pekerjaan	1
			2. Tugas dari pekerjaan	2
			3. Pedoman pekerjaan	3
		2. Kemampuan	1. Kemampuan dibidang akuntansi	4
			2. Pemahaman pekerjaan	5
			3. Kemampuan yang sesuai sebagai pengelola keuangan	6
		3. Pengalaman	1. Pengalaman dibidang akuntansi	7
			2. Pengalam dalam pengelolaan keuangan	8

<p>Pelatihan Staf Keuangan (X2)</p> <p>Kesuma (2013)</p>	<p>Pelatihan (<i>training</i>) adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu (Stamatiadis <i>et al</i> 2009).</p>	<p>1. Kemampuan</p> <p>2. Pengetahuan</p>	<p>1. Pelatihan itu sendiri</p> <p>2. Pelatihan bagi karyawan baru</p> <p>3. Pelatihan dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan mengatasi masalah</p> <p>4. Pelatihan dapat meningkatkan volume pekerjaan</p> <p>5. Pemberian pelatihan yang konsisten</p> <p>6. Pelatihan untuk mencari solusi</p> <p>7. Pengembangan bakat</p> <p>1. Peningkatan komunikasi</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>
<p>Kualitas Teknologi Informasi (X3)</p> <p>Winindyaningrum dan Rahmawati (2010)</p>	<p>Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi (Haag dan Keen, 1996). Dimana teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (<i>software &amp; hardware</i>) yang digunakan untuk</p>	<p>1. Perangkat yang sesuai dan sistem yang menunjang pekerjaan</p>	<p>1. Membantu membuat Perencanaan dalam kegiatan pekerjaan</p> <p>2. Penyelenggaraan SAP yang <i>Clean and Clear</i></p> <p>3. Sistem informasi yang cermat dan lengkap di setiap lini</p> <p>4. Aplikasi (perangkat lunak) yang sesuai dengan pekerjaan</p> <p>5. Pelatihan menggunakan perangkat</p> <p>6. Penggunaan pendamping</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>

	memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 1999).		untuk memahami teknologi yang digunakan	6
Penerapan Standar akuntansi pemerintah (X1)	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD, (Tanjung, 2012 dalam Nugraheni dan Subaweh, 2013)	1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan	1. Basis Akrua	1
Nugraheni dan Subaweh (2013) dan PP No 71 tahun 2010		2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran	2. Komponen Laporan Keuangan	2
		3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas	1. Penyajian laporan realisasi anggaran	3
		4. PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan	2. Anggaran berbasis kas	4
		5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan	1. Penyajian Laporan Arus Kas	5
		6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi	1. Calk disusun secara sistematis	6
		7. PSAP No. 07	1. Pengakuan persediaan	7
		2. Pengukuran Persediaan	8	
		1. Perlakuan Investasi	9	
		1. Pengakuan aset tetap	10	



		Akuntansi Aset Tetap	2. Pengukuran aset tetap	11
		8. PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan	1. Pengakuan kontruksi dalam pengerjaan	12
		9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban	1. Klasifikasi kewajiban	13
			2. Pengakuan kewajiban	14
			3. Pengukuran kewajiban	15
		10. PSAP No. 10 Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa	1. Konsep koreksi kesalahan	16
			2. Konsep perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa	17
		11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian	1. Komponen Laporan Keuangan Konsolidasian	18
Kualitas pelaporan keuangan (Y)  Sukmaningrum (2013)	Pelaporan keuangan adalah catatan informasi tambahan atas laporan keuangan dari suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang	1. Relevan	1. Predictive value	1
			2. Lengkap	2
			3. Tepat waktu	3
		2. Andal	1. Penyajian secara jujur	4
			2. Bebas dari salah saji material	5
			3. Netral	6

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pelaporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003) yang memiliki karakteristik: Relevan (feedback value, predictive value, Lengkap, dan Tepat waktu), Andal (penyajian secara jujur, dapat diverifikasi, dan netral), dapat dipahami, dan dapat dibandingkan	3. Dapat Dibandingkan	4. Dapat diverifikasi	7
		1. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	8
	4. Dapat Dipahami	1. Dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan	9

Berdasarkan tabel operasional tersebut, maka pengukuran dan ukuran skala yang digunakan untuk pembuatan item kuesioner adalah menggunakan *likert scale* di mana berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap seseorang terhadap pernyataan itu. Adapun yang dipakai sebagai kuesioner data angket dengan menggunakan 5 (lima) pilihan yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Cukup Setuju (CS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Setiap pilihan akan diberikan skor/bobot nilai yang berbeda seperti tampak pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Skor/Bobot Penilaian Menggunakan Skala Likert**

No	Keterangan	Skor / Bobot
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Cukup Setuju (CS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber:  
Ghozali, 2013

### 3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Regresi Linear Berganda. Metode ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas.

#### 3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2013). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

### 3.5.2 Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2013). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran *one shot* hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 *Nunnally* (Ghozali, 2013).

### 3.5.3 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variable dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = + 1 X_1 + 2 X_2 + 3 X_3 + 4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Pelaporan Keuangan

X1 = Tingkat pendidikan staf keuangan

X2 = Pelatihan staf keuangan

X3 = Kualitas teknologi informasi

X4 = Penarapan Standart Akuntansi Pemerintah

= Konstanta

X = slope regresi atau koefisien regresi dari XX

e = kesalahan residual

Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis menggunakan SPSS 22 dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) (Ghozali 2013).

## **BAB V**

### **SIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pengujian penelitian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan
2. Pelatihan staf keuangan berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan
3. Kualitas teknologi informasi berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan
4. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan dan bisa mengambil sampel yang lebih luas.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas lingkup target dalam penentuan responden penelitian dan juga lebih menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan

### 5.3 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan bukti baru bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Hasil ini diharapkan bisa dijadikan dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Dengan memperhatikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tanggung jawab, kemampuan, tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pelatihan staf keuangan dan kualitas teknologi informasi seoptimal mungkin, dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan serta adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak pengelola dan pelaporan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Kontribusi lainnya adalah bahwa temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, misalnya dua nilai informasi lain yang belum diteliti yaitu dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnaboldi, M., Lapsley, I., 2003, 'Activity Based Costing, and the transformation of Local Government', *Public Management Review*, Vol 5, No 3, pp. 345-375.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga.
- Bergman, Michael and Jan-Erik Lane. 1990. *Public policy in a principal-agent framework*. *Journal of Theoretical Politics* Vol 2, No 3, pp 339-352.
- Brusca, Alijarde, I., 1997, "The Usefulness of Financial Reporting in Spanish Local Government", *Financial Accountability & Management*, Vol 13, No 1, pp 17-34.
- Carlin, T. and Guthrie, J., 2003, 'Accrual Output Based Budgeting Systems in Australia: The Rhetoric-reality Gap', *Public Management Review*, Vol 5, No 2, pp. 145-62.
- Christiaens, J., 2001, 'Converging New Public Management Reforms and Diverging Accounting Practices in Flemish Local Governments', *Financial Accountability & Management*, Vol 17, No 2, pp. 153-70.
- \_\_\_\_\_ and E. de Wielemaker, 2003, 'Financial Accounting Reform in Flemish Universities: An Empirical Study of the Implementation', *Financial Accountability & Management*, Vol 19, No 2, pp. 185-204.
- \_\_\_\_\_ and Vanpeteghem, V., 2003, 'Governmental Accounting Reform: Evolution of the Implementation in Flemish Municipalities', *Financial Accountability & Management*, Vol 23, No 4, pp. 375-399.
- Cohen, S., Kaimenaki E. and Zorgios, Y., 2007, 'Assessing IT as a Key Success Factor for Accrual Accounting Implementation in Greek Municipalities', *Financial Accountability and Management*, Vol 23, No 1, pp. 91-111.
- Ghozali, Imam. 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang



- Haag dan Keen. 1996. *Information Technology: Tomorrow's Advantage Today*. Hammond: Mcgraw-Hill College.
- Halim, Abdul & Abdullah, Syukri . 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah
- Hodge, F.D., J.J. Kennedy, L.A. Maines., 2003 Does Search-Facilitating Technology Improve the Transparency of Financial Reporting?. *The Accounting Review* Vol 79, No 3, pp. 687-703.
- Hood, C., 1995, 'The New Public Management in the 1980s: Variations on the Theme', *Accounting Organizations and Society*, Vol 20, No 2 & 3, pp. 93-109.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011, "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen", Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta
- Indriasari, Desi dan Ertambanag Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. SNA XI Potianak.
- Insani, Istyadi. 2010. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah Daam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. [www.docstoc.com](http://www.docstoc.com)
- International Federation of Accountants (IFAC), Public Sector Committee. 2003. Study 14, Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (Second Edition)
- Irianto Jusuf, 2009. *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Pelatihan (Dari Analisis Kebutuhan Sampai Evaluasi Program Pelatihan)*, (Jakarta: Insani Cendekia), 112
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* . *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kesuma, Indra. 2013. *Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah*. Vol 2, No 3, pp. 1-14. Universitas

Diponegoro. Semarang.

- Krumwiede K., 1998, 'The implementation stages of activity-based costing and the impact of contextual and organizational factors', *Journal of Management Accounting Research*, Vol 10, No 3, pp. 239-277.
- Kwon, T. and Zmud, R., 1987, *Unifying the fragmented models of informations systems implementation*. In R. J. Boland and R. Hirschiem (Eds.), *Critical issues in informations systems research*. New York: John Wiley.
- Lane. 2003. *Management and public organization: The principal-agent framework*. University of Geneva and National University of Singapore. Working paper.
- Lapsley, I. and Oldfield, R., 2001, 'Transforming the public sector: management consultants as agents of change', *The European Accounting Review*, Vol 10, No 3, pp. 523- 543.
- Lasoma Vicky Agustiawan. 2013. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Gorontalo*
- Lillrank, Paul. 2003. "The quality of information", *International Journal of Quality & Reliability Management* Vol 20, No 6, pp. 691-703.
- Lucas, H. 2000. *Information Technology for Management* (7th ed.). Irwin/McGraw-Hill.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat
- Mariska, 2013. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Lampung*.
- Matindas, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep Ambisi Kenyataan dan Usaha*, Edisi II, Grafiti, Jakarta.
- Martin, E. 1999. *Managing Information Technology What Managers Need to Know* (3rd ed.). New Jersey: Pearson Education International.
- Mellett, H., 2002, 'The Consequences and Causes of Resource Accounting', *Critical Perspectives on Accounting*, Vol 13, No 1, pp. 231-54.
- Moe, T. M. 1984. *The New Economics of Organization*. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777

- McGowan, A., and Klammer, T., 1997, 'Satisfaction with Activity –Based cost Management Implementation', *Journal of Management Accounting Research*, Vol 9, No 4, pp. 217-237.
- Nazier, Daeng M. 2009. Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan, Makalah dalam Seminar Nasional tentang "Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Pusat Dan Daerah" Tanggal 22 Juli 2009 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Nugraheni, dan Subaweh, 2013. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 1 Vol. 13, , hal 48-58
- Ouda, H., 2008, 'Towards a Generic Model for Government Sector Reform: the New Zealand Experience', *International Journal on Governmental Financial Management*, Vol 8, No 2, pp. 78- 100.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi dan Penyusunan laporan keuangan Pemerintahan
- \_\_\_\_\_. No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pollitt, C., 2002, 'The New Public Management in International Perspective; an Analysis of Impacts and Effects', in K. Mc Laughlin, S.T. Osborne and Ferlie, E. (eds.), *New public management, The current trends and future prospects (Routledge)*, pp. 274-9 2.
- Scott, William R. (2009). "Financial Accounting Theory." 5nd Canada Inc.
- Stamatiadis, F., Eriotis, N. And Vasiliou, D., 2009, "Assessing Accrual Accounting Reform in Greek Public Hospitals: An Empirical Investigation". *International Journal of Economic Science and Applied Research*, Vol 4, No 1, pp 153-184.
- Stigler, George J. 1971. "The Economics of Minimum Wage Legislation," *American Economic Review* Vol 36, No 3, pp 358-65.

- Sukmaningrum, Tantriani dan Puji Harto. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sutaryo. 2011. Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Dengan E-Government System. <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id>
- Tanjung Abdul Hafiz . (2008). Akuntansi Pemerintahan Daerah & Konsep Aplikasi (Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan). Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Warisno, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- Widodo, Joko 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.
- Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. Pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. SNA XIII Purwokerto
- Zetra. 2009. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah. Jurnal Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.